



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
**UNIT KERJA** : STAF AHLI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TITI EKO RAHAYU
2. Jabatan : STAF AHLI MENTERI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
3. NHK : 152330

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 497.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
2. Tanah Seluas 300 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m<sup>2</sup>/88 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 125.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 18.000.000

1. MOTOR, YAMAHA B65 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 20.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 16.504.664

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 551.504.664

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 551.504.664

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.